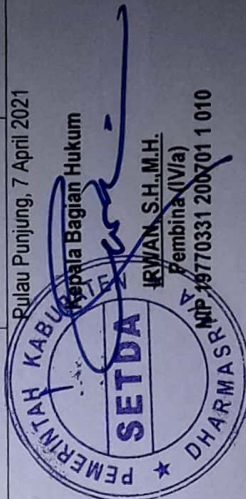


GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Bagian hukum . Setda

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KEDEPAN		
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rencana Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Dharmasraya	Akses : Masyarakat Miskin di Kabupaten Dharmasraya yang akan diberikan Bantuan Hukum Partisipasi: Rendahnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam bidang hukum, sehingga pemahaman mereka terhadap hukum pun terbatas	Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Bantuan Hukum	- Kurangnya minat baca masyarakat sehingga tidak memahami apa itu Bantuan Hukum dan bagaimana cara mendapatkannya - Belum semua masyarakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya di berikan penyuluhan tentang Bantuan Hukum	Pemberian layanan Bantuan Hukum, (advokasi Hukum) Konsultasi Hukum, Mediasi, Penjelasan Hukum dan Bantuan Fasilitasi Hukum untuk masyarakat miskin	- Memperluas cakupan atau sasaran Sosialisasi Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin	- Dari 52 Nagari telah mendapatkan sosialisasi tentang Bantuan Hukum dengan masing-masing Nagari peserta berjumlah 4 Orang	Output: Terlaksananya Sosialisasi secara menyeluruh Outcome: - Bertambahnya pemahaman masyarakat terhadap Permasalahan hukum - Terbantunya Masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Tujuannya: Fasilitasi pemberian bantuan hukum (advokasi Hukum, Konsultasi Hukum, mediasi dan Penjelasan Hukum) untuk masyarakat miskin		Manfaat: Memfasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kontrol: Kurangnya kontrol dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Bantuan Hukum						

Pulau Pinang, 7 April 2021



TIM VERIFIKASI

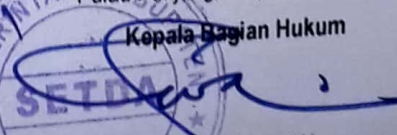
INSPEKTUR  KANDAM, S.Sos NIP.19670607 199103 1 004	KEPALA BKD  PARYANTO, S.Sos., MT NIP19690609 198902 1 001	KEPALA BAPPEDA  Drs.ANDY SUMANTO, CFra NIP.19681220 199009 1 001	KEPALA DINSOSP3APPKB  BOBBY P RIZA, S .STP., M.Si NIP19820521 200012 1 002
---	--	--	---

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)									
SKPD	: <i>Bagian Hukum Setdakab Dharmasraya</i>								
TAHUN ANGGARAN	: <i>2022</i>								
PROGRAM	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
KODE PROGRAM	4.01. 02								
KEGIATAN	Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin								
HASIL/OUTPUT	Terselenggaranya Fasilitasi Pemberian layanan Bantuan Hukum berupa advokasi Hukum, Konsultasi Hukum, Mediasi dan Penjelasan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Dharmasraya								
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Rencana Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya berupa Konsultasi Hukum, Mediasi dan Penjelasan Hukum 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> Masyarakat Miskin di Kabupaten Dharmasraya yang akan diberikan Bantuan Hukum <u>Partisipasi:</u> Rendahnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam bidang hukum, sehingga pemahaman mereka terhadap hukum pun terbatas <u>Manfaat:</u> Memfasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat masyarakat miskin <u>Kontrol:</u> Kurangnya kontrol dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Bantuan Hukum b. Penyebab Internal Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin c. Penyebab Eksternal - Kurangnya minat baca masyarakat sehingga tidak memahami apa itu Bantuan Hukum dan bagaimana cara mendapatkannya - Belum semua masyarakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya di berikan penyuluhan tentang Bantuan Hukum								
RENCANA AKSI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Memperluas cakupan atau sasaran Sosialisasi Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Meratanya Pemberian layanan Bantuan Hukum, (advokasi Hukum) Konsultasi Hukum, Mediasi, Penjelasan Hukum dan Bantuan Fasilitasi Hukum untuk masyarakat miskin baik Laki-laki maupun Perempuan</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>200.008.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen			Memperluas cakupan atau sasaran Sosialisasi Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin	Tujuan	Meratanya Pemberian layanan Bantuan Hukum, (advokasi Hukum) Konsultasi Hukum, Mediasi, Penjelasan Hukum dan Bantuan Fasilitasi Hukum untuk masyarakat miskin baik Laki-laki maupun Perempuan	Alokasi Anggaran	200.008.000,-
Komponen									
	Memperluas cakupan atau sasaran Sosialisasi Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin								
Tujuan	Meratanya Pemberian layanan Bantuan Hukum, (advokasi Hukum) Konsultasi Hukum, Mediasi, Penjelasan Hukum dan Bantuan Fasilitasi Hukum untuk masyarakat miskin baik Laki-laki maupun Perempuan								
Alokasi Anggaran	200.008.000,-								
CAPAIAN PROGRAM	<u>Output:</u> Terlaksananya Sosialisasi secara menyeluruh <u>Outcome:</u> - Bertambahnya pemahaman masyarakat terhadap Permasalahan hukum - Terbantunya Masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya								

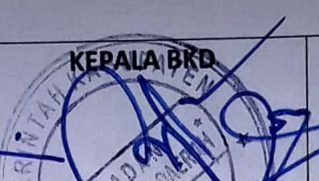
Pulau Pinang, 7 April 2021

Kepala Bagian Hukum



IRWAN, S.H., M.H.
Pembina (IV.a)
NIP. 19770331 200701 1 010

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR  KANDAM, S. Sos NIP.19670607 199103 1 004	KEPALA BKD  PARYANTO, S. Sos, M NIP.19690609 198902 1 001	KEPALA BAPPPEDA  Drs. ANDY SUMANTO, C.FrA NIP.19681220 199009 1 001	KEPALA DINAS BAPKB  BOBBY PRIZA, S. STP, M. Si NIP.19820521 200012 1 002
---	---	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sasaran Program		1. Tersosialisasikannya Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sehingga segenap masyarakat Dharmasraya yang berpenghasilan rendah (miskin) mengetahui bahwa ada Hak mereka mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ketiga mereka menghadapi kasus hukum 2. Terfasilitasinya Layanan Bantuan Hukum Gratis untuk masyarakat Miskin yang responsive gender, karena sedapat mungkin setiap perempuan dan anak yang tersandung persoalan hukum berhak mendapat advokasi hukum
Kegiatan		1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya 2. Fasilitasi Layanan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin
Sub Kegiatan		1. Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 2. Fasilitasi Layanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
	Gambaran Umum	1. Rencana Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 2. Rencana Pemberian Layanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin
Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Sosialisasi dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya Bantuan Hukum 2. Pelaksanaan Advokasi hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Dharmasraya terutama kasus hukum terhadap perempuan dan anak 3. Berkerjasama dengan Dinas terkait yang menghimpun atau membidangi pengaduan masyarakat, terutama pengaduan terhadap kasus perempuan dan Anak
	Indikator Kinerja	1. Jumlah Masyarakat miskin yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 2. Jumlah Masyarakat Miskin (Terutama perempuan dan Anak) yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum

	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan	1. Mensosialisasikan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 2. Memberikan fasilitasi layanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang responsive Gender	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	1. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 2. Menerima Pengaduan masyarakat (berkerjasama dengan Dinas terkait) seputar permasalahan hukum yang mereka hadapi	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : Kabag. Hukum Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya	
Jadwal	Mulai Januari sampai Desember 2021	
Biaya	Rp. 200.008.000,-	


 Kepala Bagian Hukum
IRWAN, S.H., M.H.
 Pembina (IV.a)
 NIP. 19770331 200701 1 010

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun						
Urusan Pemerintahan	: 4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan				
Bidang Urusan	: 4.01	SEKRETARIAT DAERAH				
Program	: 4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Sasaran Program						
Capaian Program	(Indikator)	(Target)				
Kegiatan	: 4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
Organisasi	:	Sekretariat Daerah				
Unit	:	Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2020	: Rp. 0					
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 200.008.000,-					
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 200.008.000,-	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin				
Sumber Pendanaan						
Lokasi						
Keluaran Sub Kegiatan						
Sub Kegiatan	: Dana yang dibutuhkan					
waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					200.008.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.008.000
5.1.02.01	Belanja Barang					3.297.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.297.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					3.297.000
	[#]					
	[-]					
	BBM Bensin	420 Liter	Liter	7.850	0	3.297.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					546.000
5.1.02.01.01.0024	Ordner	10 Pcs	Pcs	35.000	0	350.000
	Spesifikasi : Folio					
	pena biasa	2 Per Kotak	kotak	38.000	0	76.000
	Spesifikasi : pena biasa					
	Pena gel	2 Kotak	kotak	60.000	0	120.000
	Spesifikasi : Pena gel					
						750.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					150.000
	Kertas A4	3 Per Rim	rim	50.000	0	
	Spesifikasi : 70 gr					
	Kertas F4	12 Per Rim	rim	50.000	0	600.000
	Spesifikasi : 70 gr					
						1.589.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.589.100
	Foto Copy	5297	Lembar	300	0	
	Spesifikasi :	Lembar				
						240.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					240.000
	Meterai	40 Buah	buah	6.000	0	
	Spesifikasi : 6000					
						666.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					333.000
	Tinta Printer	3 Botol	Botol	111.000	0	
	Spesifikasi : Tinta					
	Tinta printer cair botol	3 Botol	botl	111.000	0	333.000
	Spesifikasi : warna 100 ml					
						150.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					150.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					150.000.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					
	Biaya Bantuan Hukum	10	Paket	15.000.000	0	150.000.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					46.711.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					46.711.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					46.711.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten	30 Hari	Orang / Hari	100.000		3.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten	30 Hari	Orang / Hari	120.000		3.600.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten	30 Hari	Orang / Hari	130.000		3.900.000
	Biaya Transportasi Darat Kabupaten/Kota Antar Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat	16 Hari	Orang/Kali	175.000	0	2.800.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Provinsi Sumatera Barat	18 Hari	Orang / Hari	200.000	0	3.600.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Provinsi Sumatera Barat	7 Hari	OH	650.000	0	4.550.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Provinsi Sumatera Barat	14 Hari	OH	350.000	0	4.900.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Provinsi Sumatera Barat	7 Hari	OH	1.353.000	0	9.471.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Provinsi Sumatera Barat	9 Hari	OH	650.000	0	5.850.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Provinsi Sumatera Barat	14 Hari	OH	360.000	0	5.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						200.008.000



Kepala Bagian Hukum

IRWAN S.H.M.H.

Pembina (IV.a)

NIP. 19770331 200701 1 010

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	JABATAN